Eksis

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 13(2), November 2022, 84-88
Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2580-6882 (Online), ISSN 2087-5304 (Print), DOI 10.33087/eksis.v13i2.303

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Kabupaten Batang Hari

Edison[1], Esti Susilawati[2], Yorina An'guna Bansa[3]
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi
Correspondence email: sonedi.1973@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Analisis Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Kabupaten Batang Hari". Tujuan dari penelitian adalah 1). untuk mengetahui dan menganalisis rasio DOF, RKD dan RKKD Kabupaten Batang Hari 2). untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DOF, RKD dan RKKD terhadap belanja modal Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif untuk menganalisa kemampuan keuangan daerah dan analisis kuantitatif untuk menganalisa pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap belanja modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dilihat dari derajat otonomi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori sangat rendah begitu pula dengan rasio ketergantungan keuangan daerah yang masih sangat tinggi. Derajat otonomi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari.

Kata kunci: Kemampuan Keuangan Daerah, Belanja Modal

Abstract. *This research entitled "Analysis local financial performance Its Influence To Capital Expenditure Of Regency Of Batang Hari ". The purpose of the study is 1). To know and DOF, RKD And RKKD of the districts of Batang Hari region; 2). To know and analyze the influence of DOF, RKD And RKKD on capital expenditure The districts of Batang Hari. This research uses descriptive quantitative analysis method. Descriptive analysis to analyze local financial capacity and quantitative analysis to analyze the influence of local financial ability on capital expenditure. The result of analysis shows that the financial capacity of Batang Hari Regency is seen from the degree of fiscal autonomy and the ratio of regional financial independence is categorized very low as well as the regional financial dependency ratio is still very high. The degree of fiscal autonomy have significant effect on the capital spending of the local government of Batang Hari Regency, then the ratio of local financial independence and of regional financial dependency have no significant effect on the capital spending of the local government of Batang Hari Regency..*

Keywords: *Regional Financial Capacity, Capital Expenditure.*

PENDAHULUAN

Dalam era baru perubahan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Penyelenggaraan pemerintahan, yang dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Artinya, pemerintah pusat tidak lagi menentukan segalanya dinamika kehidupan lebih tepatnya pemerintahan daerah harus mandiri dan bisa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, tetapi sekedar koordinator, pencipta insentif dan pewujud pemerataan serta kelekatan semua daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahmudi, 2010). Desentralisasi fiskal menjadi bagian penting dalam implementasi dalam Otonomi Daerah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen pemerintah yang penting dalam sistem perekonomian. Melalui instrumennya berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha, investor maupun yang lainnya.

Dalam rangka adanya desentralisasi maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan dana yang disebut dana perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil sumberdaya alam, hutan, perikanan dan beberapa pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang terakhir adalah pendapatan lain-lain yang sah. Pemerintah daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Selain itu, desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu

meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat (Halim dan Damayanti, 2004).

Menurut Suparmoko (2000), tujuan dari Desentralisasi Fiskal adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat. Sehingga dapat disimpulkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah yang dianut adalah otonomi daerah yang seluas luasnya, nyata, dan bertanggung jawab serta yang dapat diarahkan kepada pengelolaan kemampuan daerah tersebut untuk mewujudkan perekonomian yang baik dan stabil serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi Fiskal memberi ekstensi kebebasan berinovasi dan berkreasi kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perannya sebagai pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator dan regulator dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah baik dari sisi peneriman maupun pengeluaran untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya.

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Jika Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} x100\%$$

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi DBP}} x100\%$$

Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2010) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Dana Bantuan Pusat}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} x100\%$$

Perhitungan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

METODE

Untuk menganalisa Rasio Derajat Otonomi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Keuangan Daerah maka digunakan formula yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2007) :

a. Untuk mengukur rasio otonomi fiskal daerah, digunakan formulasi derajat otonomi fiskal (DOF) sebagai berikut :

$$DOF_t = \frac{\text{PAD}_t}{\text{TPD}_t} x100\%$$

b. Untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah digunakan formula kemandirian keuangan daerah (RKD) sebagai berikut :

$$RKD_t = \frac{\text{PAD}_t}{\text{DP}_t} x100\%$$

c. Untuk mengukur rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan formula ketergantungan keuangan daerah (RKKD) sebagai berikut :

$$RKKD_t = \frac{\text{DP}_t}{\text{TDP}_t} x100\%$$

Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) terhadap belanja modal Kabupaten Batang Hari digunakan model analisis regresi berganda. Persamaan dasar model analisis adalah sebagai berikut (Widarjono, 2013) :

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + ei$

Selanjutnya model tersebut ditransformasikan kedalam model berikut :

$LogBM = \beta_0 + \beta_1 DOF + \beta_2 RKD + \beta_3 RKKD + ei$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)	Keterangan
2010	22.251.818.221	547.502.663.421	*4,06*	Rendah Sekali
2011	35.729.358.965	649.928.330.623	*5,50*	Rendah Sekali
2012	37.229.501.178	803.791.649.530	*4,63*	Rendah Sekali
2013	50.623.238.098	948.697.436.658	*5,34*	Rendah Sekali
2014	70.804.984.187	949.766.204.682	*7,45*	Rendah Sekali

2015	80.687.303.704	979.345.163.395	*8,24*	Rendah Sekali
2016	73.353.584.659	1.075.282.821.696	*6,82*	Rendah Sekali
2017	87.927.396.202	1.170.365.793.966	*7,51*	Rendah Sekali
2018	98.808.531.271	1.199.729.789.613	*8,24*	Rendah Sekali
2019	92.535.466.941	1.320.677.318.382	*7,01*	Rendah Sekali
Rata-rata	64.995.118.343	964.508.717.197	*6,48*	Rendah Sekali

Sumber: Batang Hari Dalam Angka 2019 (data diolah)

DOF PAD data tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2018 yaiu 8,24 persen. DOF tertinggi pada tahun 2018 di sebabkan oleh peningkatan PAD yang lebih besar dari peningkatan total penerimaan daerah. Nilai PAD di tahun 2010 sebesar Rp 22,25 milyar dan total pendapatan daerah sebesar Rp 547,50 milyar. Nilai PAD di tahun 2019 sebesar Rp 92,53 milyar dan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.320,67 milyar. DOF terendah pada tahun 2010 sebesar 4,06 persen, hal ini di sebabkan oleh peningkatan PAD lebih kecil dari peningkatan total penerimaan daerah. Dalam arti lain pendapatan asli daerah (PAD) tidak mampu membiayai pembangunan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya masih tergantung pada sumber keuangan yang bersumber dari bantuan pemerintah propinsi dan pemerintahan pusat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	DP (Rp)	RKD (%)	Keterangan
2010	22.251.818.221	477.443.324.139	*4,66*	Rendah Sekali
2011	35.729.358.965	530.944.647.759	*6,73*	Rendah Sekali
2012	37.229.501.178	696.528.487.938	*5,35*	Rendah Sekali
2013	50.623.238.098	809.236.850.285	*6,26*	Rendah Sekali
2014	70.804.984.187	759.028.847.941	*9,33*	Rendah Sekali
2015	80.687.303.704	686.321.089.545	*11,76*	Rendah Sekali
2016	73.353.584.659	892.440.394.901	*8,22*	Rendah Sekali
2017	87.927.396.202	926.871.393.175	*9,49*	Rendah Sekali
2018	98.808.531.271	888.246.032.876	*11,12*	Rendah Sekali
2019	92.535.466.941	954.227.382.332	*9,70*	Rendah Sekali
Rata-rata	64.995.118.343	762.128.845.089	*8,26*	Rendah Sekali

Sumber : BPS Batang Hari 2019 (data diolah)

Berdasarkan uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan pada Kabupaten Batang Hari memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah yakni sebesar 8,26 persen dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan kriteria daerah tidak mandiri atau peranan pemerintah sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0-20 persen. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Batang Hari dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintahan pusat.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	DP (Rp)	TPD (Rp)	RKKD (%)	Keterangan
2010	477.443.324.139	547.502.663.421	*87,20*	Sangat Tinggi
2011	530.944.647.759	649.928.330.623	*81,69*	Sangat Tinggi
2012	696.528.487.938	803.791.649.530	*86,66*	Sangat Tinggi
2013	809.236.850.285	948.697.436.658	*85,30*	Sangat Tinggi
2014	759.028.847.941	949.766.204.682	*79,92*	Tinggi
2015	686.321.089.545	979.345.163.395	*70,08*	Tinggi
2016	892.440.394.901	1.075.282.821.696	*83,00*	Sangat Tinggi
2017	926.871.393.175	1.170.365.793.966	*79,20*	Tinggi
2018	888.246.032.876	1.199.729.789.613	*74,04*	Tinggi
2019	954.227.382.332	1.320.677.318.382	*72,25*	Tinggi
Rata-rata	762.128.845.089	964.508.717.197	*79,93*	Tinggi

Sumber: BPS Batang Hari 2019 (data diolah)

.

Penurunan ketergantungan pada bantuan pemerintah provinsi dan pusat harus terus diupayakan. Hal ini sangat terkait dengan tujuan otonomi daerah yang bukan hanya mampu mengelola aktifitas ekonomi

daerah namun mampu mengelola sumber pendapatan dan keuangan daerah. Pada tahun 2014 ketergantungan keuangan daerah sudah mulai membaik dan tidak masuk dalam kategori ketergantungan yan sangat tinggi. Artinya peningkatan PAD mampu melebihi peningkatan dana perimbangan sehingga proporsi PAD meningkat jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

Rasio ketergantungan sangat tinggi, menggambarkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi keuangan). Hal ini mendasar dari kriteria daerahini mengacu pada belum mandirinya keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, karena masih sangat tingginya persentase nilai rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Analisis Pengaruh DOF, RKD dan RKKD Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Batang Hari Selama Tahun 2010-2019

Dependent Variable: LOGBM
Method: Least Squares
Date: 07/25/20 Time: 19:32
Sample: 2010 2019
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.48607	4.176486	3.468483	0.0133
DOF	0.492973	0.407697	1.209164	0.0721
RKD	-0.367219	0.351944	-1.043402	0.3370
RKKD	-0.042780	0.047610	-0.898551	0.4035

R-squared	0.748101	Mean dependent var	11.22700
Adjusted R-squared	0.172151	S.D. dependent var	0.140637
S.E. of regression	0.127961	Akaike info criterion	-0.985014
Sum squared resid	0.098244	Schwarz criterion	-0.863980
Log likelihood	8.925068	Hannan-Quinn criter.	-1.117788
F-statistic	1.623851	Durbin-Watson stat	1.787136
Prob(F-statistic)	0.080407		

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + ei$
$LogBM = \beta_0 + \beta_1 DOF - \beta_2 RKD - \beta_3 RKKD + ei$
$BM = 14{,}48607 + 0{,}4929 DOF - 0{,}3672 RKD - 0.0427 RKKD + ei$

Analisis Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien determinan (R^2 adalah 0,748 atau 74,8 persen ini artinya bahwa kemampuan variabel DOF, RKD dan RKKD dalam mempengaruhi belanja langsung adalah sebesar 74,8 persen sedangkan sisanya 25,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN

Derajat otonomi fiskal dan rasio kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dilihat dari tergolong dalam kategori rendah sekali, dengan rata-rata nilai derajat otonomi fiskal 6,48 persen dan nilai rasio kemandirian keuangan daerah 8,26 persen begitu pula dengan rasio ketergantungan keuangan daerah yang masih sangat tinggi dengan rata-rata nilai 79,93 persen. Kinerja keuangan daerah DOF memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai α : 0,072 < 0,10 sedangkan RKD dan RKKD memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal dengan nilai α : 0,337 > 0,10 dan α : 0,403 > 0,10.

Saran

Meningkatan secara intensif dan ekstensif komponen PAD Kabupaten Batang Hari melalui peningkatan laba BUMD dan memperbanyak BUMD sebagai sumber pendapatan daerah di kabupaten batang hari dan pemanfaatan lebih intensif aset daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Memperbaiki pencatatan keuangan daerah di Kabupaten Batang hari agar terhindar dari penyelewengan dan tindakan KKN yang dapat mengurangi pendapatan daerah di Kabupaten batang hari, serta melakukan tindakan yang tegas bagi yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2001-2019. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia*. Jakarta: BPS Pusat

Badan Pusat Statistik, 2001-2019. *Batang Hari Dalam Angka*. Jambi: BPS Jambi.

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks

Dora, Jualiani. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014.* Yoyakarta : Universitas Sanata Dharma

Elmi, Bachrul, 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia* : UI Press. Jakarta.

Fathah, Rigel Nurul, 2015. *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yogyakarta :* Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Gerungan, dkk. 2013. *Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara.* Sumatera utara : Universitas Sumatera Utara.

Halim dan Damayanti, 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah* ; seri bunga rampai manajemen keuangan daerah, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2010. *Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik/Pemda.* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM.

Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (edisi 2). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Pubilk.* Edisi 3. FE UGM. Yogyakarta.

Mankiw, Gregory N. 2006. *Teori Makroekonomi*. 6th Edition. Nurmawan[penerjemah]. Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo . 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi

Mutiha, H Artahaingan, 2016, "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014*". Jakarta : Universitas Indonesia

Mustaqim. 2001. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas Jambi.

Reksohadiprodjo, S. 2000. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Rusydi, 2010. *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005 – 2008).* Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro, Semarang.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sartika, Novira. 2019. "*Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti.* Riau : Politeknik Negeri Bengkalis.

Sianturi, Simonsen. 2011. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi Diponegoro Semarang. Semarang.

Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi di Indonesia.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi 2*. Prenada Media Group. Jakarta

Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonomterika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Widayati, Ana Sri. 2014. *Dampak Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta.* Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah